BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Eksistensi perusahaan dianggap memiliki manfaat bagi masyarakat karena perusahaan memiliki kemampuan untuk menyediakan barang, jasa maupun lapangan pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Beragam manfaat yang disediakan oleh perusahaan ini lantas menimbulkan dependensi masyarakat terhadap perusahaan yang kemudian membawa perusahaan menduduki posisi yang sangat penting dan semakin pervasif. Hal ini menjadikan setiap tindakan yang dilakukan perusahaan, bahkan tindakan yang kecil, memiliki dampak yang luas. Sayangnya, keberadaan perusahaan tidak semata-mata memberikan beragam manfaat, tetapi juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat, antara lain munculnya polusi udara dan air, kebisingan suara, kemacetan lalu lintas, limbah kimia, hujan asam, radiasi, sampah nuklir, dan masih banyak dampak negatif lainnya. Hal ini disebut sebagai eksternalitas negatif perusahaan (Haholongan, 2016).

Salah satu eksternalitas negatif yang ditimbulkan perusahaan ialah timbulnya kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup ialah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria yang telah ditetapkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009). Sedangkan yang dimaksud sebagai lingkungan hidup ialah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Faktanya, keberadaan perusahaan beserta segala eksternalitasnya telah membawa kerusakan lingkungan yang dapat meningkatkan potensi penurunan kualitas kehidupan manusia, seperti peningkatan suhu akibat gas karbon yang ditimbulkan oleh gas buang perusahaan dimana hal tersebut dapat meningkatkan ancaman kelaparan akibat penurunan produksi tanaman atau gagal panen sebagai dampak dari evaporasi yang berlebihan. Selain itu, peningkatan suhu

secara ekstrim dapat meningkatkan serangan wabah penyakit serta berkembangbiaknya bibit penyakit (Hairiah, Rahayu, Suprayogo, dan Prayogo, 2016).

Sama halnya yang dirasakan oleh perusahaan, hampir setiap kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan memiliki konsekuensi negatif bagi lingkungan hidup sehingga dapat berujung pada tindakan perusakan lingkungan. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya kontribusi sektor industri dalam penurunan kualitas lingkungan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dihasilkan oleh sektor industri mencapai 274,90 juta ton CO₂ dan memiliki rata-rata 32% dari total emisi nasional dalam kurun waktu 2010-2015 (Kementerian ESDM, 2016). Selain itu, terdapat beberapa kasus kerusakan lingkungan akibat operasi bisnis, seperti kasus PT Lapindo Brantas yang aktivitas pengeborannya mengakibatkan semburan lumpur tiada henti yang telah berlangsung selama 12 tahun hingga berakibat pada penurunan kualitas lingkungan maupun kualitas hidup masyarakat sekitar (Voaindonesia.com, 2018). Perusakan lingkungan serupa juga telah dilakukan oleh 130 perusahaan yang telah dijatuhi sanksi akibat terbukti melakukan pencemaran lingkungan karena dengan sengaja membuang limbahnya ke Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Pabrik-pabrik tersebut terbukti telah mencemari 5 (lima) sungai yang bermuara ke DAS Citarum yang tengah dalam proses revitalisasi. Sama halnya terjadi pada Sungai Bengawan Solo yang juga mengalami penurunan kualitas. Pengujian sampel air yang diambil dari sungai tersebut menyatakan bahwa sungai tersebut terkontaminasi kandungan berbahaya yang berasal dari limbah tekstil (Sindonews.com, 2018).

Sebagian besar dari peristiwa perusakan lingkungan di Indonesia telah terbukti disebabkan oleh perusahaan manufaktur karena tidak sedikit kegiatan operasional perusahaan manufaktur yang berdampak secara langsung pada lingkungan. Beberapa contoh diantaranya ialah suara mesin produksi yang menghasilkan polusi suara, alat transportasi yang berpotensi menghasilkan pencemaran udara maupun getaran, penggunaan air tanah yang berlebihan, limbah yang belum memenuhi baku mutu, penggunaan dan kebocoran zat-zat yang berbahaya. Selain itu, perusahaan manufaktur juga seringkali menghasilkan gas-gas

buang yang berpotensi mencemari udara. Dari kondisi tersebut, dapat dilihat bahwa perusahaan manufaktur memiliki banyak faktor yang selalu bersentuhan dengan isu-isu lingkungan dan berpotensi menimbulkan konflik jika tidak ditanggulangi.

Oleh karena itu, perusahaan di Indonesia khususnya perusahaan manufaktur perlu memperhatikan usaha pelestarian lingkungan. Usaha pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan dikenal sebagai kinerja lingkungan (Wahyudi dan Busyra, 2011). Kinerja lingkungan merupakan suatu tindakan sukarela perusahaan untuk mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan ke dalam operasinya dan interaksinya dengan pemangku kepentingan, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum, dimana tindakan-tindakan tersebut merupakan usaha yang dilakukan perusahaan dalam rangka menciptakan kualitas lingkungan yang lebih baik. Dengan demikian kinerja lingkungan yang baik dapat menggambarkan tanggung jawab dan kepedulian yang dimiliki perusahaan terhadap komponen-komponen yang ada dalam lingkungan sekitarnya, yang terwujud dalam usaha untuk menyediakan kualitas hidup yang baik bagi masyarakat sekitarnya.

Pada dasarnya permasalahan terkait kinerja lingkungan telah diatur secara hukum, yakni dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 yang mengamanatkan bahwa pengendalian lingkungan hidup harus dilaksanakan oleh setiap pihak, termasuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Peraturan ini juga diperkuat dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang menyatakan perlunya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) bagi perusahaan dalam memperoleh izin lingkungan yang menjadi prasyarat memperoleh izin usaha. Dasar hukum inilah yang mendasari lahirnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER).

Berdasarkan PROPER, kinerja lingkungan perusahaan diukur dengan menggunakan warna, dimana pemeringkatan ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam menilai kinerja lingkungan perusahaan dengan tujuan untuk memberikan apresiasi bagi perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik dan memberikan

sanksi bagi perusahaan dengan kinerja lingkungan yang buruk. Bahkan hasil penilaian tersebut juga akan diumumkan secara periodik kepada masyarakat sehingga masyarakat pun turut mengetahui dampak perusahaan bagi lingkungannya (Fitriani, 2013). Alhasil, tidak sedikit perusahaan terpaksa memperoleh sanksi akibat kinerja lingkungan yang buruk, mulai dari sanksi berupa denda hingga sanksi penarikan ijin usaha, bahkan memperoleh citra yang buruk dari masyarakat akibat tidak mampu menyediakan kualitas hidup yang baik bagi masyarakat sekitarnya.

Adanya peraturan yang disertai oleh sanksi yang tegas telah memperkuat kenyataan bahwa lingkungan yang buruk memiliki dampak langsung bagi perusahaan. Sejalan dengan hal itu, Shroff (2014) menyatakan bahwa perkembangan ekonomi dunia semakin dihadapkan pada permasalahan yang timbul akibat dampak dari lingkungan. Dampak yang dirasakan oleh perusahaan tidaklah hanya sebatas sanksi berupa denda ataupun penarikan ijin usaha, namun sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kinerja lingkungan yang buruk juga akan mempengaruhi citra perusahaan dalam pandangan masyarakat, termasuk investor maupun kreditor. Oleh karena itu perusahaan juga perlu meningkatkan akuntabilitas mereka, dimana dalam rangka meningkatkan akuntabilitasnya, perusahaan perlu menginklusi aspek lingkungan dan sosial dalam praktek pengungkapan perusahaan yang tertuang dalam laporan tahunan (Gray, Owen, dan Adams, 1996:47). Melalui mengintegrasikan aspek lingkungan dalam akuntabilitasnya, maka perusahaan juga memberikan sinyal-sinyal komplementer mengenai kondisi aktual perusahaan kepada pemangku kepentingannya, khususnya kepada investor perusahaan.

Dalam perkembangannya kinerja lingkungan semakin menjadi perhatian investor dalam analisis investasi mereka dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengambilan keputusan, meminimalkan risiko dan mengoptimalkan pengembalian jangka panjang (Sridharan, Herman, dan Hagan, 2018). Dalam pandangan investor, kinerja lingkungan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dalam mengevaluasi perusahaan, bukan hanya dalam kinerja ekuitas tetapi juga faktor-faktor terkait dengan penilaian aset riil dan penetapan harga obligasi yang diterbitkan perusahaan dimana aspek-aspek tersebut juga

dipengaruhi oleh kinerja lingkungan perusahaan (Ernst & Young, 2017). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Friede, Busch, dan Bassen (2015) yang menyatakan bahwa 90% studi empiris menemukan adanya hubungan yang positif antara kinerja lingkungan dengan kinerja keuangan perusahaan, dimana hal tersebut menggambarkan bahwa kinerja lingkungan sangatlah relevan bagi investor dalam mengambil keputusan investasinya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terjadi pergeseran dari sudut pandang investor, dimana sebelumnya investor cenderung hanya memandang informasi akuntansi sebagai satu-satunya informasi yang relevan, sedangkan saat ini banyak investor mulai mempertimbangkan berbagai informasi non-keuangan, salah satunya informasi kinerja lingkungan sebagai informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan (Barth, Li, dan McClure, 2018).

Banyaknya pengaruh tersebut menunjukkan bahwa aspek lingkungan merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan investor dalam pengambilan keputusan investasinya. Oleh karena itu, kewajiban perusahaan dalam menyediakan dan mengungkapkan informasi terkait dengan aktivitas lingkungan yang telah dilakukan semakin riil. Bahkan, Perry dan Singh (2011) menyatakan bahwa terdapat dampak langsung yaitu meningkatnya kemampuan perusahaan untuk mengoptimalkan *equity benefit*, yang akan diterima perusahaan terkait dengan pengungkapan lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan. Hal ini dikarenakan setiap pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan akan ditangkap oleh investor sebagai suatu sinyal sehingga dapat memunculkan reaksi dari investor yang terwujud dalam keputusan investasinya.

Sayangnya, hingga saat ini pengungkapan terkait dengan aspek lingkungan masihlah bersifat sukarela (*voluntary disclosure*). Berdasarkan *International Financial Reporting Standard* (IFRS) yang diadopsi oleh standar akuntansi di Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 1 menyatakan bahwa laporan lingkungan disajikan sebagai laporan tambahan dalam laporan keuangan perusahaan (Norhasimah, Bahari, Adnan, Kamal, dan Ali, 2016). Pengungkapan sukarela ini tidak diimbangi dengan kearifan lokal (*local wisdom*) masyarakat Indonesia yang kurang memiliki tanggung jawab lingkungan yang baik,

baik dari pihak perusahaan maupun pihak investor (Andrew dan Costese, 2011). Lain halnya terjadi pada negara-negara maju, mayoritas perusahaan telah memiliki tanggung jawab lingkungan yang baik. Sebanyak 78% dari 250 perusahaan terbaik di dunia percaya bahwa pengungkapan lingkungan sangatlah relevan bagi investor mereka oleh karena itu mereka telah melakukan pengungkapan lingkungan dalam laporan tahunannya (KPMG, 2015). Demikian pula dari pihak investor, hasil survei yang dilakukan Ernst & Young (2017) menyatakan 60% dari responden, yang terdiri atas investor di negara-negara maju meyakini bahwa perusahaan yang tidak mengungkapkan aspek lingkungan beserta dengan risiko-risiko lingkungan yang dimiliki oleh perusahaan, dapat secara negatif mempengaruhi keberlanjutan bisnis mereka sehingga memilih untuk tidak melakukan investasi pada perusahaan sedemikian.

Beberapa hasil dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya juga mendukung hasil temuan Ernst & Young, salah satunya ialah penelitian yang dilakukan oleh Zuraida, Houque, dan Zijl (2014) yang menyatakan bahwa semakin banyaknya informasi yang diungkapkan oleh perusahaan, yakni informasi yang terkait dengan lingkungan, akan meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Clarkson, Fang, Li, dan Richardson (2010); Bernardi dan Stark (2017); Griffin, Lont, dan Sun (2012) yang menyimpulkan bahwa pengungkapan secara sukarela terkait dengan aspek lingkungan sangatlah informatif sehingga diperlukan investor dalam pengambilan keputusannya karena memiliki relevansi nilai. Dalam perspektif investor, informasi dan kinerja perusahaan terkait lingkungan sama pentingnya dengan informasi dan kinerja keuangan perusahaan dalam proses pengambilan keputusan investasi (Sridharan, dkk., 2018). Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Grewal, Hauptmann, dan Serafeim (2017) bahwa kinerja lingkungan yang diukur dengan *Sustainability Performance Ratings*, yang diintegrasikan dengan pengungkapan sukarela terkait dengan lingkungan, mampu meningkatkan kualitas informasi perusahaan sehingga mengakomodasi kebutuhan investor terhadap informasi yang relevan bagi pengambilan keputusannya.

Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarumpaet, Nelwan dan Dewi (2017) yang dilakukan pada 60 perusahaan yang terdaftar di BEI pada periode 2002-2012 menyatakan bahwa kinerja lingkungan perusahaan yang diukur dengan PROPER yang baik akan memiliki relevansi nilai bagi investor sedangkan kinerja lingkungan yang buruk tidak memiliki relevansi nilai bagi investor. Hal ini dikarenakan investor di Indonesia hanya memberi fokus kepada perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik. Sedangkan kinerja lingkungan yang buruk tidak akan mempengaruhi atau tidak relevan bagi pengambilan keputusan investor yang tercermin dari tidak munculnya tindakan ‘menghukum’ yang diwujudkan dalam bentuk harga saham yang menurun bagi perusahaan dengan kinerja lingkungan yang buruk.

Adanya hasil penelitian yang tidak konsisten telah menjadi motivasi dilakukannya penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut terkait relevansi nilai atas kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Oleh karena itu, obyek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode 2015-2017 karena dalam periode tersebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kerap mendorong perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI untuk melakukan dan mengungkapkan faktor-faktor lingkungan yang relevan dengan operasional perusahaan (OJK, 2014). Perusahaan manufaktur dipilih karena kelompok perusahaan ini merupakan perusahaan yang mengolah bahan baku atau barang setengah jadi untuk menghasilkan barang jadi melalui suatu proses produksi, sehingga bersentuhan secara langsung dengan lingkungan, baik dalam pengambilan bahan baku maupun dalam proses produksinya. Selain itu, jumlah perusahaan manufaktur di Indonesia cukup banyak sehingga pervasif bagi kualitas keseluruhan lingkungan di Indonesia. Oleh karena itu, dibandingkan industri lainnya, perusahaan manufaktur seringkali ditemukan menghadapi permasalahan terkait dengan pertanggungjawaban lingkungan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah kinerja lingkungan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2015-2017 memiliki relevansi nilai?
2. Apakah pengungkapan lingkungan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2015-2017 memiliki relevansi nilai?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk menguji dan menganalisis:

1. Adanya relevansi nilai dalam kinerja lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2015-2017.
2. Adanya relevansi nilai dalam pengungkapan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2015-2017.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat akademis
Sebagai acuan atau pembanding bagi peneliti berikutnya yang akan meneliti topik sejenis mengenai relevansi nilai dari kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan perusahaan manufaktur.
2. Manfaat praktis
 - a. Memberikan masukan bagi manajemen perusahaan mengenai adanya relevansi nilai atas kinerja lingkungan beserta dengan pengungkapannya dalam laporan tahunan. Dengan demikian, perusahaan di Indonesia dapat mulai memperbaiki kinerja lingkungan serta mengungkapkannya dalam laporan tahunannya.
 - b. Memberikan masukan bagi investor mengenai adanya relevansi nilai dan pentingnya informasi terkait kinerja lingkungan perusahaan sehingga dapat memperoleh pengembalian yang maksimal dari investasi yang dilakukannya.

- c. Memberikan masukan bagi Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk menyediakan rerangka yang dapat dijadikan acuan dalam pengungkapan lingkungan perusahaan sehingga dapat meningkatkan kualitas pengungkapan lingkungan perusahaan-perusahaan di Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teori yang meliputi: *stakeholder theory*, *signaling theory*, relevansi nilai, kinerja lingkungan, pengungkapan lingkungan; penelitian terdahulu; pengembangan hipotesis; serta rerangka penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan desain penelitian; identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel; jenis dan sumber data; metode pengumpulan data; populasi, sampel, dan teknik penyampelan; serta analisis data yang digunakan.

BAB 4 ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum obyek penelitian, deskripsi data, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran.